

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul Utama	i
Halaman Judul	ii
Halaman Ujian Terbuka	iii
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Lembar Motivasi dan Persembahan	vi
Abstrak	viii
<i>Abstract</i>	ix
Intisari	x
<i>Summary</i>	xvi
Kata Pengantar	xxii
Daftar Isi	xxviii
Daftar Tabel	xxxii
Daftar Gambar	xxxiv
Daftar Grafik	xxxvi
Daftar Lampiran	xxxvii
Daftar Singkatan	xxxix
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.2. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	16
1.5. Keaslian Penelitian	17
 BAB II. TELAAH PUSTAKA	 19
2.1. Pengertian dan Implementasi Kebijakan Publik	19
2.2. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	26
2.3. Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	31
2.4. Reformasi Birokrasi	38
2.5. Kepatuhan dan Kecurangan (<i>Compliance dan Fraud</i>)	39
2.6. Teori Kepatuhan Rasional (Rational Choice Theory)	45
2.7. <i>Good Governance</i> dan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	51
2.8. Utilitas dan Permintaan Barang dan Jasa	56
2.8.1. Efek Perubahan Harga Pada Utilitas Permintaan	61
2.8.2. Efek Perubahan Pendapatan Pada Utilitas Permintaan	66
2.8.3. Pendekatan <i>Revealed Preference Theory</i>	70

2.8.4. Pendekatan Atribut	72
2.9. Elastisitas Permintaan (<i>Demand Elasticity</i>)	75
2.10. Efek Fraud dalam Pengadaan Barang dan Jasa	82
2.10.1. Efek <i>Fraud</i> Melalui Pendekatan Penawaran (<i>Supply</i>)	82
2.10.2. Efek <i>Fraud</i> Melalui Pendekatan Keseimbangan Produsen	85
2.11. Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Kecil	87
2.12. Kinerja (<i>Performance</i>)	90
2.13. Kelayakan dan Kinerja UMKK	91
2.14. Pengembangan Kapasitas (<i>Capacity Building</i>)	95
2.15. Pemberdayaan (<i>Empowerment</i>)	99
2.16. Strategi Pemberdayaan UMKK	104
2.17. Penelitian Terdahulu	109
2.18. Kerangka Pemikiran	118
BAB III. METODE PENELITIAN	123
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	123
3.2. Populasi dan Metode Pengambilan Sampel	124
3.3. Metode Pengumpulan Data	127
3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian	129
3.5. Metode Analisis Penelitian	134
3.6. Strategi Pemberdayaan	146
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN	152
4.1. Sejarah Kota Bitung	152
4.2. Gambaran Umum Daerah Penelitian	154
4.2.1. Keadaan Geografi	154
4.2.2. Keadaan Demografi	156
4.2.3. Keadaan Sosial dan Ekonomi	158
4.2.3.1. Pendidikan	158
4.2.3.2. IPM dan Kemiskinan	159
4.2.3.3. Ketenagakerjaan	160
4.2.3.4. Pendapatan Perkapita, PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi	161
4.2.3.5. Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah	163
4.3. Deskripsi Obyek Penelitian	166
4.3.1. Profil SKPD di Kota Bitung	166
4.3.2. UMKK Selaku Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah	171
4.3.3. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	175
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	178
5.1. Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Pengadaan Barang dan Jasa	178

5.1.1.	Implementasi Prinsip Efisien	184
5.1.2.	Implementasi Prinsip Efektif	185
5.1.3.	Implementasi Prinsip Transparan	187
5.1.4.	Implementasi Prinsip Terbuka	189
5.1.5.	Implementasi Prinsip Bersaing	191
5.1.6.	Implementasi Prinsip Adil/Tidak Diskriminatif	193
5.1.7.	Implementasi Prinsip Akuntabel	194
5.1.8.	Implementasi Penyusunan RUP Barang dan Jasa	196
5.1.9.	Implementasi Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa	198
5.2.	Kebutuhan (<i>demand</i>) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	200
5.3.	Kelayakan UMKK Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah	210
5.4.	Keberdayaan UMKK Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah	212
5.4.1.	Tingkat Keberdayaan Aspek Usaha (AU)	215
5.4.2.	Tingkat Keberdayaan Aspek Teknologi & Informasi (ATI)	217
5.4.3.	Tingkat Keberdayaan Aspek SDM (ASDM)	219
5.4.4.	Tingkat Keberdayaan Aspek <i>Lobbying</i> (AL)	221
5.4.5.	Tingkat Keberdayaan Aspek Peran <i>Stakeholders</i> (APS)	223
5.4.6.	Tingkat Keberdayaan Aspek Kelaikan Penyedia (AKPU)	225
5.5.	Strategi Pemberdayaan UMKK Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah	228
5.5.1.	Peringkat Prioritas Pemberdayaan UMKK Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah	232
5.5.2	Peringkat Prioritas Pemberdayaan UMKK Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Kriteria Alternatif Aspek Usaha	233
5.5.3.	Peringkat Prioritas Pemberdayaan UMKK Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Kriteria Alternatif Aspek Teknologi dan Informasi	235
5.5.4.	Peringkat Prioritas Pemberdayaan UMKK Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Kriteria Alternatif Aspek SDM	236
5.5.5.	Peringkat Prioritas Pemberdayaan UMKK Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Kriteria Alternatif Aspek <i>Lobbying</i> ...	238
5.5.6.	Peringkat Prioritas Pemberdayaan UMKK Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Kriteria Alternatif Aspek Peran <i>Stakeholder</i>	240
5.5.7.	Peringkat Prioritas Pemberdayaan UMKK Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Kriteria Alternatif Aspek Kelaikan Penyedia	242
5.5.8.	Peringkat Prioritas Pemberdayaan UMKK Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Kriteria semua Aspek	244
5.5.9.	Strategi Pemberdayaan UMKK Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Aspek Usaha	258
5.5.10.	Strategi Pemberdayaan UMKK Penyedia Barang dan Jasa	

Pemerintah Melalui Aspek Teknologi & Informasi	266
5.5.11. Strategi Pemberdayaan UMKK Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Aspek SDM	272
5.5.12. Strategi Pemberdayaan UMKK Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Aspek <i>Lobbying</i>	278
5.5.13. Strategi Pemberdayaan UMKK Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Aspek Peran <i>Stakeholders</i>	283
5.5.14. Strategi Pemberdayaan UMKK Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Aspek Kelakian Penyedia	292
BAB VI. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN	296
6.1. Kesimpulan	296
6.2. Implikasi Teoritis	301
6.3. Implikasi Kebijakan	302
6.4. Keterbatasan Penelitian	303
6.5. Saran Penelitian Selanjutnya	304
DAFTAR PUSTAKA	306
LAMPIRAN	319